

ANALISA

**MASALAH - MASALAH
INTERNASIONAL**

PENDIDIKAN SEBAGAI

FAKTOR KEKUATAN

I



CHANDLER'S LITHOGRAPH
PRINTED BY

THE CHANDLER LITHOGRAPH
PRINTED BY

THE CHANDLER LITHOGRAPH
PRINTED BY



CHANDLER LITHOGRAPH

CHANDLER LITHOGRAPH

PENGANTAR PENERBIT

Penerbitan kali ini menyangkut suatu masalah kebijaksanaan dalam negeri yang selain dalam perumusannya sudah sewajarnya memperhitungkan perkembangan dan arah perkembangan masyarakat juga tidak pernah dapat mengabaikan konstelasi perubahan dalam dunia internasional: pendidikan.

Pendidikan sebagai faktor kekuatan bangsa menentukan tingkat martabat bangsa dan karenanya pula menempatkan bangsa itu dalam suatu kedudukan yang wajar dalam pergaulan antar bangsa. Di pihak lain, melihat semakin besarnya interdependensi dunia, pendidikan merupakan faktor yang dapat menyelaraskan hubungan antar bangsa dalam pola baru ini. Identitas dan integritas bangsa tidak lagi dapat berpijak atas nasionalisme picik semata-mata. Semangat dan cita-cita berdaulat harus dapat diisi dengan kekuatan riil yang mampu bersaing dalam dunia yang pada azasnya bersifat kompetitif. Ketidak-mampuan suatu bangsa untuk menempatkan diri dalam pola persaingan yang bisa dianggap cukupkejam ini hanya akan berakibat pada terulangnya pola pergaulan internasional abad ke-19.

Memang, dibandingkan dengan percatutan politik internasional dewasa ini, di abad ke-19 belum dikenal faktor nuklir, tetapi kenyataan itu tidak mengubah kecenderungan-kecenderungan negara-negara besar dan kuat untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pihak-pihak yang lemah. Faktor nuklir menimbulkan suatu tata-bahasa baru, tetapi logika dari percatutan politik internasional tetap tidak berubah. Ia adalah logika dalam memonangkan kepentingan-kepentingan nasional. Imperialisme, kolonialisme dan neokolonialisme pada dasarnya merupakan akibat dari kecenderungan-kecenderungan di atas yang menjadi kenyataan karena adanya ketidakseimbangan yang besar. Penilikan nuklir oleh beberapa negara besar memang merupakan salah satu aspek dalam ketidakseimbangan baru ini, tetapi aspek ini bergerak dalam tataran tata-bahasa yang lain yang meliputi negara-negara besar itu sendiri, juga demi memenuhi kebutuhan untuk melanjutkan persaingannya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Yang kiranya merupakan aspek yang lebih penting yang langsung menyangkut hubungan antara negara-negara maju dan

negara-negara berkembang dalam ketidakseimbangan ini adalah faktor manusianya. Faktor manusia menentukan tingkat ketahanan nasional bangsa, dan melalui pengembangan faktor ini dapat diharapkan ketidakseimbangan dapat diperbaiki. Kita benar bahwa arah perkembangan dunia menunjukkan semakin besarnya gaya-gaya alamiah dari sistem dunia sebagai keseluruhan untuk memaksakan hubungan interdependensi antar bangsa, setiap bangsa harus mempersiapkan dirinya untuk mampu menempatkan dirinya secara wajar dalam sistem tersebut. Berscalannya adalah sederhana: interdependensi terjadi antara partner yang sederajat. Celakanya, waktu yang tersedia tidak banyak, sedangkan persoalan dalam pendidikan cukup rumit: ia menyangkut dasar eksistensi manusia.

Sehubungan dengan tinjauan singkat di atas ini kami secara dua kali berturut-turut akan memuat beberapa karangan yang memikirkan tentang pembaharuan pendidikan di Indonesia, yang sebagai persoalan tidak lagi baru, tetapi tidak pernah akan cukup untuk dipikirkan secara mendalam. Penerbitan bulan Februari ini memuat tiga karangan yang pernah diajukan oleh para penulisnya dalam Konferensi Ilmiah yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Belgia, Jerman Barat, Netherland dan Swiss, bulan April 1971, yang kami anggap tetap aktual sebagai bahan pemikiran. Karangan-karangan ini kami kutip dengan persetujuan pengarangnya dari penerbitan kertas-kertas karya Konferensi Ilmiah tersebut yang berjudul "Pendidikan dalam rangka pembaharuan dan pembangunan".

DAFTAR ISI

Hal.

Pengantar Penerbit

i

Men cari Alternatif Sistem Pendidikan dan Pengajaran
di Indonesia

E.J. Sutarto EMIDJCSUSONG

3

Persalan Approach dalam Menpolakan Pendidikan
Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Daced JCESGEE

27

Beberapa Aspek Ekonomi dalam Penyusunan Planning
Pendidikan

F. Hendrarto PCSPGSCETJIITC

39



Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Tanah Abang III/27, Jakarta

PENCARI ALTERNATIF SISTIM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI INDONESIA

E.J. Sutarto HARDJOSUSONO

Die Aufgabe der Schule wurde allgemein in der Vorbereitung der Schüler auf das Leben gesehen - eine allgemeine Auffassung, die natürlich wenig Gegner haben konnte. Meinungsverschiedenheiten stellten sich jedoch sofort ein, als versucht wurde, diese Formel konkret zu interpretieren. Sie konnte die Bereitschaft bedeuten, sich selbst zu erziehen, sie konnte auch die Fähigkeit meinen, ein Gewerbe auszuüben, oder es konnte sich um staatsbürgerliche Erziehung, um den den Erwerb einer Allgemeinbildung etc. handeln. Diese Mehrdeutigkeit der "Vorbereitung auf das Leben" verlangt eine nähere Untersuchung.

(John Dewey: "Die Schule als Vorbereitung auf das Leben", in Reform des Erziehungsdenkens, New York 1959).

I. Indonesia Tahun 1971

Bidang (sistim) pendidikan-pengajaran memerlukan planning yang baik. Sebagai negara-yang-sedang-berkembang yang memiliki 117 juta individu manusia menjelang tahun 2000 pendidikan-pengajaran merupakan faktor vital bagi pembangunan masyarakat dan negara:

- Tujuan pedagogis yang terpenting daripada pengajaran ialah perkembangan maksimal bagi kepribadian anak-didik (murid, siswa, mahasiswa);
- Tujuan kemasyarakatan yang utama daripada pengajaran ialah memberikan kesempatan-kesempatan maksimal kepada semua yang berhak menerima pendidikan/pengajaran dengan mengingat perbedaan bakat dan kemampuan masing-masing;
- Tujuan politik pengajaran (Unterrichtspolitik) ialah sebanyak mungkin memberikan keleluasaan, dengan kata lain memampukan mereka untuk dapat mencapai taraf yang dapat dicapainya.

Konklusi penulis menanggapi keadaan (situasi) bidang pendidikan-pengajaran di Indonesia:

- Yang kurang dalam lapangan (sektor) tersebut ialah pertemuan sistematis antara pengajaran dan beleid, di mana dapat dipersecaikan secara terbuka problema-problema dan aktivitas-aktivitas yang telah dan sedang berjalan tanpa reserve;
- Yang dirasa tidak ada ialah pertukaran pikiran secara terbuka dengan masyarakat tentang perencanaan persecaian-persecaian pengajaran yang penting dan bersifat menentukan, khususnya yang menyangkut infrastruktur pengajaran-perskolahan, sehingga ada tendens bahwa dari atas diberikan begitu saja sesuatu yang dalam banyak hal tidak cocok dan kurang dapat diterima oleh masyarakat; dengan kata lain kesemuanya masih bersifat tertutup, tidak demokratis;
- Lokasi dari research-pengajaran (onderwijsresearch) tentu akan dipengaruhi oleh pertemuan (ontmoeting) dan keterbukaan (openhoid) dan akan mempunyai arti yang essensiil.
- Dalam abad kemajuan teknik sekarang ini hampir semua sistim pendidikan di semua negara menjadi usang, untuk jelasnya dapat disebutkan kenyataan sebagai berikut:
 1. Tanggung jawab dari pemerintah/negara jelas sekali semakin meluas. Situasi sosio-ekonomis gejala-gejalanya sangat evident: negara menjamin kesejahteraan/kemakmuran rakyatnya. Dalam bidang kebudayaan tugas-tugasnya semakin meningkat banyaknya. Sektor materiil tidak akan dapat berkembang cukup jika dalam sektor kebudayaan tidak terdapat pengembangan yang wajar dan sebaliknya, sehingga yang satu tidak merungkinkan yang lain;
 2. Hasrat untuk mengetahui bertambah. Pengetahuan yang harus disimpan, dikembangkan dan ditularkan, seringkali dalam bentuk tingkat pengetahuan (kebudayaan) yang tinggi cq. al. spesialisasi. Ilmu pengetahuan merupakan (menjadi) inti dari perkembangan masyarakat dan teknologi, yang terus menanjak meningkat mempengaruhi banyak lapangan dalam segala fasot-fasetnya;
 3. Pengajaran menentukan secara jelas nasib rezeki (tempat) pribadi manusia dalam pasaran-kerja (arbeidsmarkt). Di samping itu di dalam masyarakat terciptakan tempat-tempat yang fungsionil vital untuk dijabat oleh tenaga-tenaga yang kompeten;
 4. Adanya tendens proses demokrasi yang sedang berjalan yang menginfiltrir sektor pendidikan-pengajaran (schoolwezen), sehingga aspek demokrasi tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dan yang lambat laun perlu diintegrasikan ke dalam infrastruktur pendidikan-pengajaran. (1)

Perubahan-perubahan masyarakat dibarengi dan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, terlahirkan pandangan-pandangan baru dalam cara di mana dan ke mana struktur edukatif dari persekolahan (schoolwezen) harus disesuaikan.

- Konsekwensinya ialah bahwa politik serta sistim pendidikan-pengajaran yang temporer dan lokaliter tidak lagi dapat memberikan jawaban kepada tantangan zaman serta tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan masyarakat. Maka perlu diciptakan politik pendidikan-pengajaran yang baru, yang konstruktif, yang dapat dijuruskan pada kebutuhan-kebutuhan baru dan sesuai dengan pandangan-pandangan alternatif.

Diperlukan planning yang dapat dipertanggungjawabkan dan yang dapat menelurkan infrastruktur (dasar, tujuan, sistim) yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan hidup dalam jangka panjang setiap anggota masyarakat.

- Untuk dapat membuat planning yang baik diperlukan penyelidikan-penyelidikan yang fundamential oleh Lembaga Research Pendidikan-Pengajaran, di mana bekerja: penyelidik-penyelidik, politisi, pejabat-pejabat-yang-membuat-beleid, wakil-wakil-sektor-pengajar dan wakil-wakil masyarakat (orang tua murid). Komunikasi antara periset dengan dan mereka yang "vertoelken" kehendak rakyat harus dijamin dengan baik, agar pilihan alternatif dapat mencerminkan kedaulatan individu, warga masyarakatnya.
- Mengapa diusulkan lagi terbentuknya Lembaga Research Pendidikan-Pengajaran, karena ternyata, bahwa:
 1. di Indonesia ada "onderwijsbeleid" yang terjurus dan aktif;
 2. "herstrukturering" pengajaran yang mendalam menjadi suatu keharusan yang primer harus diarahkan ke partisipasi maksimal dari warganegaranya, baik dalam mengambil bagian dalam pengajaran ataupun dalam menentukan sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan-pengajaran;
 3. pemerintah atau kementerian yang bersangkutan mengambil inisiatif untuk mengkoordinir, memanfaatkan riset-riset-centra yang ada;
 4. menugaskan salah satu Universitas Induk untuk membuat "leerstoel" baru, di mana dikembangkan secara khusus riset dan beleid pendidikan-pengajaran ditujukan ke arah "Pembaharuan infrastruktur pendidikan-pengajaran" sebagai disiplin ilmiah yang bertugas khusus.

- Fungsi sistem pengajaran yang harus ditemukan ialah:
Yang dapat mengintrodusir generasi muda ke dalam kebudayaan dan diferensiasi yang selektif di dalam generasi untuk mencapai tempat dan tugas, yang akan dilaksanakan oleh si-anak-didik di dalam masyarakat. Lembaga pendidikan-pengajaran tidak boleh terlepas dari masyarakat, tidak boleh kembali lagi menjadi "Pädagogische Provinz" dengan pemerintahannya yang otonom.

Dalam bab X "REPELITA" (1969-1973) sektor pendidikan dan kebudayaan terbaca sebagai berikut

ad II. Pendataan dan masalah-masalah

- a. Pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya beberapa ketidakseimbangan.
 1. ialah ketidakseimbangan mengenai jumlah penduduk yang berumur cukup untuk sekolah dengan jumlah fasilitas yang dapat disediakan mereka. Hal ini lebih-lebih dirasakan karena adanya kesadaran dan keinginan para warga masyarakatnya yang lebih besar daripada tahun-tahun yang lampau untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan.
 2. ialah ketidakseimbangan pendidikan secara horisontal yaitu antara jenis/bidang pendidikan. Tingkat kemajuan yang dicapai di bidang pendidikan kejuruan dan teknis secara relatif kurang sekali dibanding dengan bidang pendidikan umum. (Perbandingan jumlah murid sekolah umum dan kejuruan pada sekolah lanjutan pertama -SLTP- adalah 2 : 1)
 3. ialah ketidakseimbangan secara vertikal yaitu perbandingan antara sekolah dasar, sekolah lanjutan menengah, dan perguruan tinggi/akademi-akademi. Kenyataan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah tingkat menengah di bidang kejuruan teknik, ketinggalan perkembangannya dibanding dengan tingkat-tingkat pendidikan yang lain. (Tahun 1967 terdapat 13 juta murid SD; 1 juta murid SLTP; 500.000 murid SLTA; 230 mahasiswa pada pelbagai Universitas, Institut dan akademi-akademi negara maupun swasta).

Proporsi diferensiasi yang tidak seimbang

Arus mahasiswa kejuruan non-eksakta di tingkat pendidikan tinggi jauh melebihi arus mahasiswa dalam jurusan-jurusan yang relatif lebih terasa kebutuhannya seperti pertanian, teknologi dan sebagainya. Stokoprase perbandingan tahun 1967: perbandingan jumlah masing-masing 155.000 orang dan 75.000 mahasiswa.

Petidakseimbangan yang tidak selektif mengakibatkan kurang sesuaiya persediaan tenaga kerja dengan kebutuhannya seperti sektor agraris yang merupakan sumber kehidupan rakyat sebagian besar. Sedang pendidikan menengah dan tinggi di bidang ini masih menunjukkan banyak kekurangan.

Kwalitas hasil pendidikan:

Kwalitas hasil pendidikan masih dirasakan kurang oleh karena kelemahan-kelemahan di bidang kurikulum dan masih kurangnya tenaga pengajar yang "qualified" (pedagogis/didaktis) dan yang "bevoegd".

- Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama di sekolah-sekolah lanjutan, mengakibatkan adanya lulusan-lulusan sekolah lanjutan umum yang tidak dapat dipergunakan secara langsung dalam sektor-kerja dalam rangka pembangunan;
- Metode, didaktik dan aspek-aspek pedagogik mengajar masih jauh dari sempurna. Metode evaluasi (menilai kecakapan murid) dalam belajar yang memberikan aksen pada ujian mengakibatkan sistem-belajar-murid yang hanya ditujukan "belajar-untuk-ujian";
- Masalah guru/pengajar menjadi faktor kekacauan yang pertama. Guru yang dinonaktifkan tahun 1967 berjumlah 286.000, termasuk guru yang tidak bevoegd dan yang setengah bevoegd. Faktor minus tersebut diakibatkan juga karena "screening" kudeta 30-September; Kurangnya balas-jasa ekonomi-finansiil para pengajar banyak yang meninggalkan lapangan pawayatan; penggerogotan "wibawa" pengajar yang disebabkan devaluasi status guru.
- Sektor administrasi persekolahan merupakan "chaos" yang sukar ditertibkan karena keadaan sekolah (cq. juga guru) yang tidak mendapat pembiayaan yang cukup; (oleh situasi diciptakan uang "ini" uang "itu");
- Budget negara yang diberikan untuk sektor pendidikan-pengajaran dan kebudayaan yang proporsionil -dilihat dari fungsi kepentingannya- rendah (sedikit).

Evaluasi umum infrastruktur sektor pendidikan-pengajaran yang sekarang masih berlaku:

- a. Syndroom warisan pendidikan-pengajaran zaman kolonial (feodalistische Tendenzen):
 - qua tempo: identik dengan sistem pendidikan di Nederland yang sedang diperbaharui;

- qua scala: identik dengan scala pendidikan yang diciptakan oleh Thorbecke, yang mendapatkan pengesahan dan pengesahan pada tahun 1930;
- qua perspektif sosio-ekonomis: analog dengan tujuan dan garis kurikulum pengajaran yang berlaku di Nederland;

di mana terdapat ciri-ciri "perfectisme", "zelf-geneezzaamheid", "pedagogisch purisme", "kurang realistis dalam opzet dan aanpak"-nya. (cf. Baudet & Brugmans: "Balans van beleid", Groningen 1960, hal. 10).

b. Syndroom warisan pendidikan-pengajaran zaman Jepang (1940-1945), (tendens uniformisme militeristis):

- pedagogische psychose: hubungan horisontal murid dengan guru yang mengurangi keberanian murid untuk mengkritik sesuatu yang salah, di mana keutlakan pengetahuan guru (harus digugu dan ditiru) kurang menjamin "zelfkritik" dan memasukkan ke dalam alam kepatuhan yang psychohygienis tidak sehat;
- Identifikasi belajar dan bekerja: di mana tidak jelas lagi garis interaksi daripada kapan "belajar" dan kapan "bekerja" yang mengakibatkan kaburnya "leerplan" dan kurikulumnya.
- "Meager educational facilities provided by the Japanese" diuraikan oleh George Mc T. Kahin di dalam "Asian nationalism and the West" (1953, hal. 181, 183).

c. Syndroom menentukan unsur "mencari identitas bangsa" dengan "teknik pendidikan-pengajaran-modern" dari hasil peninjauan beberapa ahli (yang lebih berdasarkan antusiasme daripada realitas-praktis) di banyak negara di dunia ini dan yang hasilnya tidak lain daripada perubahan (pembaharuan) yang tidak fundamental:

(1945-1971): synthesebeginsel.

Kesimpulan ad. a, b, dan c, bahwa belum ada perubahan fundamental secara infrastruktur, walaupun sistimnya sudah hampir satu abad berlaku, sehingga "image" untuk bersekolah dan dari tingkat yang diperoleh karena pengakuan ijazah masih tetap mengejar "statussymbol" dan "white collar job", yang tidak cocok dengan lapangan kerja (arbeidsmarkt) yang diciptakan oleh situasi, kondisi serta tuntutan zaman teknik modern. Diskrepasi antara "das Sein" dan "das Sollen" masih terisi oleh suasana romantis heroistis dan onderwijskundig-pedagogis-dilettantistis-denken, hal mana telah mendapat kupasan dalam kongres yang diselenggarakan oleh

departemen P.P. dan K. di Cipayung 28-30 April 1969 (cq. Setijadi: "Laporan hasil Seminar Identifikasi problema Pendidikan", 1969, Bab I, persoalan pendidikan). Dan yang disinyalir sebagai "bencana nasional" yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang disebabkan oleh kurangnya integrasi antara sistim persekolahan sekarang dan pembangunan masyarakat (cq. Seri Pelita Pendidikan: "Situasi dan Kesimpulan-kesimpulan", buku ke-2, hal. 14).

Dasar dan Tujuan Pendidikan/Pengajaran di Indonesia:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan kewajiban berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia Indonesia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945 serta memajukan kebudayaan nasional (cf. Tap MPRS No. XXVII/MPRS/66 yang berhubungan dengan pasal 31 dan 32 Bab XIII UUD '45), dalam rangka usaha ke arah tercapainya tujuan yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD '45, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan, yang bebas merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dalam wadah Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila. (cf. Mashuri: "Trasaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Musyawarah Nasional Mahasiswa, Bogor, Desember 1970, hal. 5).

I. Perspektif tahun 2000 (prognose)

"Pendidikan" dalam abad teknik modern; di mana sebagian besar tenaga berfikir teknis akan dapat sebagian banyak diambil-oper oleh komputer.

Type manusia yang lebih sadar akan martabatnya sebagai individu yang mempunyai hak-hidup yang berkembang sesuai dengan bakat serta kemampuannya, dan peka akan azas demokrasi.

Suasana hidup yang kompetitif disebabkan oleh lebih terbuka serta lebih mudah tercapainya jarak (hubungan satu negara dengan yang lain), perkembangan sosio-ekonomis negara-negara: blok kapitalis, sosialis dan dunia ketiga yang otomatis akan mempertajam "challenge".

Fungsi televisi, radio, dan alat (media) penyebar lainnya yang memungkinkan untuk menyelenggarakan "programierter Unterricht" (cf. U. Schramm: "Programmierter Unterricht heute

und morgen", Berlin-Bielefeld '63, Schulpolitisches Forum, Band III).

- "Explosion scolaire", yang dihadapi oleh semua negara di seluruh dunia, menghadapkan Indonesia pada kesukaran-kesukaran yang tidak dapat dihindarkan: kekurangan tenaga pengajar (eksplosi penduduk); kemutlakan untuk her-dan bijscholing dari pengajar; kelas-kelas sekolah yang terlalu kebanyakan murid; gedung-gedung (ruang-ruang) sekolah yang tidak sesuai lagi; timbulnya lembaga-lembaga (akibat "verzuilings"-politik) yang tidak terkoordinir; tradisi-tradisi yang kaku (krisis-konflik-kebudayaan); pertengkaran yang tak mudah diselesaikan dalam bidang tujuan dan isi daripada pengajaran-persekolahan. Di samping itu kemungkinan kekacauan dalam:

- a. fase analisa dari situasi yang ada dan tujuan intermediair pembaharuan yang diinginkan;
- b. fase "planontwikkeling" dan fase menentukan sarana-sarana rencana yang harus diselenggarakan;
- c. fase peralihan ke arah type infrastruktur persekolahan yang diambil sebagai alternatif.

Penyelidikan "comparative education" dapat memberikan gambaran bagi bangsa Indonesia dalam mencari alternatif type sekolah yang diinginkan, yang cocok dengan kondisi, kemampuan dan status negara Indonesia di tengah-tengah dunia Internasional. Berikut beberapa gambaran:

III. Negara Skandinavia, cq. Swedia

Setiap proses belajar, mengajar dan "vorming" mencoba implisit atau eksplisit untuk melaksanakan (merealisasikan) tujuan-tujuannya. Pertanyaan yang dikondisionir oleh metodik: "bagaimana dapat dicapai tujuan ini" baru mempunyai arti jika tujuan tersebut dengan jelas diformulir. Hal ini kelihatannya logis tetapi serta sudah berjalan sementara waktu analisa dan evaluasi menunjukkan arah yang berlainan. Pada mula-mulanya yang disibuki ialah mendalami materi pengajarannya serta metodenya. Baru timbulah kemudian pertanyaan apakah rombongan dari proses-proses pengajaran serta vorming benar-benar sudah cocok. Hal mana membawa orang pada pengetahuan bagaimana tujuan-tujuan pengajaran harus dicapainya. Setelah itu baru

dapat dipikirkan perkembangan dari rencana pengajarannya untuk membangun teknologi pengajaran serta evaluasinya. Sudah barang tentu klasifikasi tujuan-tujuan belajar mempunyai arti yang besar. Dalam hal ini penyelidik seperti Benjamin S. Bloer (cf. Bloer, B.S.: "The Thought Processes of Students in Discussion, in S.J. French, *Accent on Teaching*", New York, Harper Bros 1954) telah memberikan kejelasan tentang permasalahannya. Dengan ditonjolkan aspek taxonomi dimudahkan pertukaran informasi tentang "leerplan ontwikkeling" dan "evaluatie-middelen". Dalam keseluruhannya faktor taxonomi ini memberikan titik-titik terang dalam menanggapi "ilmu pendidikan" (onderwijskunde), spesial dalam bidang didaktik.

Negara Swedia kini telah berhasil merombak sistim pendidikan dan pengajarannya secara fundamental, di mana ditegaskan prinsip-prinsip diferensiasi seleksi serta "doorstroming" dalam infrastruktur persekolahan yang mereka sebut "comprehensive school" sebagai sistimnya yang dituangkan dalam struktur sekolah-sekolah unit (scholengemeenschap). (cf. Torsten Husen: "Loss of talent in selective school systems: the case of Sweden" dalam *comparative education review*, '60, Nr. 4; dan idem dalam "Social determinants of the comprehensive school", dalam *International Review of Education*, 1963, nr. 9).

Dalam melihat alternatif sistim yang diambil oleh negara Swedia perlu disadari kotiga faktor sosiografis:

1. arti yang lebih besar dari isolasi geografis yang memberikan ciri di dalam negara Swedia yang relatif tipis penduduknya;
2. kesediaan orang-tua-murid yang besar untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah internat (kostscholen);
3. tiadanya "zuilenstelsel" (pengkotakan politik, agama etc.) dalam masyarakatnya.

Negara Swedia dapat disebut negara liberal yang lebih mengutamakan pandangan humaniter di atas segala pandangan pengkotakan.

ed. 1. Proses "doorstroming" di Swedia ke pendidikan pro-universiter kuat sekali, disebabkan oleh berkurangnya (spreading) geografis di daerah-daerah di luar kota, hal mana telah dinyatakan melalui penyelidikan pada tahun 1950 (cf. T. Husen: "Educational structure and the development of ability", dalam *Ability and Educational Opportunity*, ed. A.E. Halsey, Malmö 1961, hal. 127). Faktor tersebut terlepas dari merites daripada "schoolgemeenschap".

- ad.2. Gejala di atas menguntungkan proses "doorstroming" ke arah tingkat-tingkat pendidikan tinggi di Swedia.
- ad.3. Dengan dihilangkannya batas "pengkotakan" (politik, religi dan lapisan kemasyarakatan) maka dijamin diferensiasi-pengajaran yang sangat meluas, yang sudah diterapkan dan berjalan baik di Swedia dalam sistim "scholengemeenschap".

Perlu juga disadari, bahwa negara Swedia adalah negara yang berkemajuan tinggi, yang sudah jauh proses liberalisasinya dalam banyak lapangan hidup, pula bahwa rakyatnya sudah sampai pada taraf pendidikan dan kemajuan mental yang cukup baik tarafnya.

Negara sosialis, cq. Uni Sovyet

Di negara sosialis seperti halnya di Uni Sovyet berlaku penraktekan "Sowjetpädagogik", yang jelas dasar falsafahnya adalah Marxisme. Pendidikan "polytechnik" yang diintrodusir ke dalamnya sebenarnya bukan berasal dari Marx. Tetapi perkawinan antara dasar falsafah pendidikannya dengan sistim politeknik sejak semula demikian disatukan sehingga oleh rakyat Sovyet hal tersebut tidak lagi diketahui darimana asal pemikiran prinsip politeknik tersebut. Kekeliruan autentik di Sovyet Uni ialah adanya anggapan, bahwa Karl Marx adalah "Begründer der modernen wissenschaftlichen Pädagogik" dengan argumen bahwa pikiran tentang pendidikan polytechnik tersebut terdapat di "Das Kapital", karya Karl Marx tersebut. Baik dasar ataupun interpretasinya sebenarnya tidak merupakan barang baru, hanya dalam terminologi di Uni Sovyet hal tersebut diterjemahkannya. Oleh sejarah dibuktikan, bahwa introduksi "polytechnische Erziehung" tersebut secara prinsipil bertentangan dengan mazhab Tolstoj. Juga bukan Lenin, bukan Krupskaja dan juga bukan Lunacarskij, tetapi justru Blonskij yang mengintegrasikan "Bildungskonzeption" ke dalam terminologi Sovyet-marxistis. Iada tahun 1866 dikenal oleh Marx dalam arti, bahwa "technical instruction" yang menghubungkan (mengkonvergir) "geistige Bildung" dengan "körperliche Bildung". Asal mula prinsip ini tanpa expressis verbis disebutnya polytechnische Erziehung berasal dari L.N.L. Carnots "Ecole Polytechnique", jadi dalam zaman awal sosialismus. Dalam sejarah pendidikan dalam revolusi Perancis 1794

dilahirkan sekolah politeknik. Kemudian dalam tahun 1806 didirikan di Praha, 1815 di Wina, 1825 di Karlsruhe, 1827 di München, dan 1856 di Zürich.

Dalam buku Marx "Das Kapital" ditogaskan sebagai berikut: Ein auf Grundlage der grossen Industrie naturwuchsig entwickeltes Element dieses Umwälzungsprozesses sind polytechnische und agronomische Schulen, ein anderes sind die Berufsschulen, worin die Kinder der Arbeiter einigen Unterricht in der Technologie und praktischen Handhabung der verschiedenen Produktions-elemente erhalten (Leonhard Froese: "Russische und Sowjetische Pädagogik", Heidelberg, 1963, hal. 19). Kemudian oleh aliran Saint-Simonisme secara institusional dijadikan pendidikan politeknik revolusioner yang didasari oleh ide-ide sosialisme: "dass grundsätzlich das natürliche Wertmass die menschliche Arbeit ist oder die miteinander verbundenen körperlichen und geistigen Kräften des Menschen in Tätigkeit" (R. Owen). Dalam tahap pemikiran pembaharuan selanjutnya maka pendidikan politeknik tersebut dilengkapi dengan gagasan-gagasan "reformpädagogischer Ansätze" dari tokoh-tokoh seperti Scharrelmann dan John Dewey tanpa "Arbeitskonzeption"-nya Kerschensteiner, sehingga formulasinya berbunyi demikian: Das Ziel polytechnischer Bildung ist die Einführung des Kindes in die Beherrschung der modernen industriellen Kultur. Modelnya terwujud dalam polytechnische Einheitsarbeitsschule, di mana pengetahuan yang menghubungkan teori dan praxis, sekolah dan bekerja dijadikan kesatuan yang produktif.

Dengan terciptanya pendidikan yang antroposentris di Uni Sovyet, maka tidak ada tempat lagi untuk ide-ide sosial republik yang bersifat individu-liberal. Yang sekarang masih berlaku ialah "Gestaltungsmotiv" pembaharuan pendidikan Uni Sovyet yang falsafahnya digariskan sebagai berikut: "Der Begründung der humanitären Bildungsidee von naturrechtlichen Freiheitsprinzip aus der geistigen Bewegung der russischen Intelligenz zum Bewusstsein ihrer entscheidenden Gestaltungskraft" (Ibidem L. Froese, hal. 21). Sedang garis pembaharuan yang diberikan oleh Anton Bakarenko tidak merupakan penyimpangan dari prinsip politeknik, bahkan menegaskan dan lebih jauh sedikit perikirannya dengan mengemukakan "Die autoritär Pädagogik". Tokoh inilah yang dikenal di dunia internasional sebagai 'der Begründer der Repräsentant der modernen Sowjetpädagogik'. Taraf perikirannya lebih hura

daripada politik kebudayaan Sovyet di bawah Stalin yang mengoperir "Pädagogik ohne Mensch". Pengaruh politeknik sebagai ide menjadi populer dan sebagian diambil over oleh tokoh-tokoh seperti Montessori, John Dewey, Kilpatrick, Parkhurst, Ferriere dan Decroly. (cf. Makarenko A.S.: "Der Weg ins Leben", Moskow 1947).

Negara Amerika, cq. Amerika Serikat

Dari keseluruhan sistimnya Amerika Serikat paling kurang mempunyai "perskolahan unit" (einheitliches Schulsystem) yang konsekwen. "Office of Education" mempunyai fungsi untuk mengolah, memberi advis serta menghantar (begleiden) "perskolahan unit" tersebut. Tujuan utama dari pendidikan-pengajaran di Amerika Serikat ialah untuk meng-amerikakan anak didiknya. Kekuatan-kekuatan serta lembaga-lembaga pendidikan di luarnya, seperti organisasi pemuda, bekerjasama dengan sekolah sebagai supervisi pemerintahnya. Otonomi perskolahan unit tersebut terutama kelihatan dari "Schülerselbstverwaltung"-nya. Intern type sekolah di A.S. ditandai oleh "team spirits" dan perasaan kolegal yang besar. Discipline jasmaniah dan pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang penting. Kepentingan kemasyarakatan sosial terutama di Amerika Utara diraksa oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan (Fürsorge), biasanya oleh fihak gereja. Sekolah-sekolah netral tidak mengenal pengajaran religi.

Garis pemikiran pendidikan-pengajaran sangat dijiwai oleh "Reform des Erziehungsdenken" dari John Dewey, seorang pendekar teori pragmatisme, yang berprinsip pada "action teaching". Di setiap negara-serikat-bagian sekolah-sekolahnya agak berbeda, tetapi soal organisasinya merupakan kesatuan, jadi pluriform dalam bentuk tetapi mempunyai ciri kesamaan dalam organisasi. Proses sentralisasi dalam waktu akhir-akhir ini kelihatan semakin kuat. Dilihat dari sudut infrastrukturnya maka di dalamnya terjaminlah aspek-aspek seleksi, diferensiasi serta penyaluran yang cukup pluriform (doorstroming). Pemraktekan seleksi selalu dirasakan melalui tests dan psychotechnik.

Dasar pemikiran falsafah pendidikan-pengajaran John Dewey ada persamaannya dengan falsafah Dilthey atau Nietzsche.

Sistin berfikir Dewey lebih menjurus ke arah menguraikan situasi-situasi konflik yang berada dalam masyarakat, yang selalu dilihatnya sebagai sesuatu yang terus menerus pada manusia dan alam sekitarnya (cf. Dewey J.: "Schule und Gesellschaft", Chicago 1899, hal. 22-23). Berikut stolling-nya yang ditegaskan: "Da aber der Mensch wesentlich in diesem Prozess der Veränderung seines Verhaltens steht, ist sein Leben durch die Prozesshaftigkeit gekennzeichnet". Di mana nyata bahwa Dewey bersamaan pendapat, bahwa manusia secara fundamental dalam proses hidup ini berdialog dengan dunia sekelilingnya. "Weil nun der Mensch nicht als Subjekt einer von ihm getrennten Welt als Objekt gegenübersteht, sondern das eine im anderen ist, gibt es keine Möglichkeit für den Menschen, den Prozess des Lebens zu transzendieren, man kann als Mensch 'nicht hinter das Leben' zurückgehen. Insofern duftet oder versteht der Mensch seine Welt immer schon, wenn er in ihr handelt" (Correl, W.: "Die psychologischen und philosophischen Grundlagen des Erziehungsdenkens John Deweys", hal. 16, 17, 18).

Perlu disadari bahwa situasi baik materil maupun mental di A.S. sudah mencapai taraf amerikanisasi tertentu, sehingga memungkinkan terjaninnya bentuk sistim "pragmatisme", di mana sekolah benar-benar sudah dapat merupakan persiapan untuk hidup, tempat untuk mengolah dan memperkaya serta menularkan kebudayaan.

Sudah barang tentu banyak juga kelemahan-kelemahan yang menandai pendidikan dan pengajarannya, seperti juga setahun berselang telah digugat oleh pemuda-pemudanya dengan protes moratorium. Banyak pula kritik yang dilansir dari beberapa penjuru dunia mengenai "pragmatisme" yang berlaku di Amerika (cf. Hardjosuseno E.J.S.: "Wijgerig anthropologische Critiek op de Theorie van John Dewey", Nijmegen 1960, hal. 35-42).

Eropah Barat, cq. Nederland

Nederland yang mempunyai penduduk 13 juta dan yang daerahnya seperlima dari pulau Jawa menganggap perlu untuk memperbaharui sistim, struktur serta maksud tujuan dari pendidikan pengajarannya sesuai dengan tuntutan kemajuan teknik modern. Jelaslah bahwa pandangan para ahli pengajaran (onderwijskundigen) telah dapat membawakan perencanaan perbaharuan yang dilihat dari infrastrukturnya sangat drastis.

Althans drastis dalam idenya, apakah pembaharuan tersebut akan mudah dilaksanakan hal ini tergantung pada banyak faktor. Auctor intelektualis dari sistim yang lazim disebut "Harmoetwet" adalah Mr. Cals, waktu beliau menjabat Perdana Menteri dalam kabinet Marijnen/de Jong (2 periode kabinet) dan pada tahun 1967 disyahkan rencana negara untuk merombak sistim pendidikan pengajaran. Dasar pemikiran pembaharuan tersebut adalah sebagai berikut: "Naast de kennisoverdracht is het doel van ons onderwijs het aanleeren van methoden: het zal een relatie-ontdekkende functie moeten hebben. De inhoud van sommige wetenschappen wordt reeds thans iedere 15 jaar verdubbeld. Wij mogen niet langer onze leerplannen cumulatief met kennisinhoud blijven opvullen en uitbreiden. Wij zullen een keuze moeten maken, ons moeten beperken tot de hoofdzaken, en bij onze leerlingen vooral goede studiemethoden en een juiste habitus moeten aankweken, hen op het spoor moeten zetten". (Dept. C.T. & W, 1967).

Terang bahwa motivasi-motivasinya sangat terarah dan sistim yang baru mengutamakan prinsip-prinsip selektif. Hal ini nampak dalam pola persekolahan yang menunjukkan dasar gambar yang lain dan lebih sempurna. "Behalve voor de rationele intelligentie hebben wij meer oog gekregen voor de pragmatische intelligentie. Wij moeten onze leerlingen brengen tot een persoonlijk oordeel, tot zelfstandige besluitvorming, tot objektieve kennishantering en overdracht door een goede methode en door het ondorkennen van de relaties. Wij moeten onze jongens meisjes op weg zetten, zij behoeven niet alles te weten; het is belangrijker dat wij hen toetsen naar hun vaardigheid en intentiegedurf om volgens een taak te volbrengen. Het is belangrijker, dat wij nagaan of zij weten te ordenen, te coördineren en te doorgronden, dan dat wij hun een massale feitenkennis overheren. Overigens, de abiturient zal ook na zijn schoolloopbaan, telkens opnieuw, meer en andere kennis moeten blijven vergaren en vooral blijven leeren hanteren, wil hij zich in de maatschappij handhaven.

Dalam sistim yang baru diintrodusir sekaligus alat-alat audivisual. Terang bahwa di sini pembaharuan sistim sekaligus meniadakan intelektualisme dan lebih menjurus sasarannya pada individu manusia yang berhak belajar dan mendapatkan tempat yang wajar dalam masyarakat sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Satu aspek yang baru ialah dimasukkannya niyogrepen dan projektonderwijs yang lebih akan menjamin aspek

17
differentiasi dan doorstroming, sedang penilaian seleksi bukan lagi didasarkan angka mati tetapi penilaian (evaluasi) keseluruhan manusianya dengan potensialitasnya. Untuk ini Nederland memilih bentuk perskolahan yang mirip dengan sistem di Swedia, ialah "scholengereenschap" dan "categoriale school" (Van Week, F.: "Het verbergen talent" dalam milieu, schoolkeuze en schoolgeschiedheid, Amsterdam 1968, deel 31, no. 4).

Dunia Ketiga, eq. "ide konsep UNESCO"

(Onderwijsconferentie Wereldraad van Bergen, diselenggarakan tanggal 8 Juli 1969 di Bergen, Nederland)

Mariano Baptista, Menteri Pendidikan Bolivia:

Mengkritik pendidikan barat yang oleh negara-negara dunia ketiga lazim dipakai tanpa reserve (kritik) sebagai norma pendidikan pengajarannya. Alasannya ialah, bahwa negara yang tidak mengambill-alih beberapa (atau sama sekali) aspek-aspek pendidikan pengajaran Barat dianggap tidak bermartabat, alias primitif (?)

Thomas Eskelle, fungsionaris terkemuka dari Kamerun:

Menjauhkan diri dari pendidikan pengajaran Barat, juga modelnya tidak diterima olehnya. Alasannya, bahwa di Eropa dan di Amerika terlalu ditonjolkan kepentingan manusia sebagai individu dalam mengembangkan kualitasnya (?)

Terdapat beliau ialah: "Kita perlu pendidikan yang menyelurahi masyarakat sebagai kesatuan", dengan kata lain sekaligus mencakupi seluruh masyarakatnya.

Anzon Anon Loma, kepala sekolah dari Tanzania:

Terdapat: "jika saya berbicara tentang pendidikan pengajaran yang saya bayangkan adalah kebutuhan alat-alat pertanian, kandang serta makanan ayam. Sekolah harus bersangkutan dengan hidup sehari-hari secara langsung. Anak didik harus dapat produktif, diajar mencintai pekerjaan tangannya, sehingga dengan demikian dapat membiayai sebagian sekolahnya sendiri". (?)

Dr. Paulo Freire, ahli pengajaran dari Brazilia:

Seorang buta huruf bukan terpatnya di dalam masyarakat modern, jadi perlu diberantas, tetapi biasanya metode yang dipakai untuk mengatasi kebutahurufan ini tidak mengandung unsur dialogis. Benar diajarkan membaca dan menulis, tetapi apa yang

dibaca dan ditulisnya tidak diketahui oleh yang bersangkutan, tidak ada pengaruhnya yang "geestveredolend". Jangan menatikan kreativitas. Berfikir kritis harus dilatih; dapat kritis terhadap masyarakat. Pengajaran yang telah pernah diberikan ialah tidak menjamin "vermenselijking" (?)

Bahwa nyata sikap setiap negara terhadap sistim dan metode pendidikan pengajaran Barat tegas menolak, atau paling sedikit dengan reserve dan ingin mengambil alternatif, ialah mencari prinsip-prinsip serta formula-formula pendidikan pengajaran yang sesuai dengan kondisi, situasi serta aspirasinya. Pendidikan tidak netral, justru harus memerdekakan (membebaskan) serta menghumanisir manusia.

Lartin Ekwa dari Kongo:

Terdapat distropansi besar antara pendidikan dasar (primer) dengan pendidikan sekunder (menengah). Di Kongo murid sekolah dasar dipersiapkan untuk pengajaran menengah sedangkan belum sampai pada tarafnya. Masyarakat di Kongo merasa puas (tanpa sebab yang riil) karena berhasil menisahkan diri dari sistim pengajaran Belgia, hanya bahasa Perancis masih dipertahankan karena lebih praktis dan sempurna dibandingkan dengan bahasa daerah masing-masing. Oleh beliau dikatakan bahwa: "De school is een onderdrukkingsinstrument van de gevestigde machten".

Delegasi dari Filipina:

Menyatakan pendapat yang sama, bahwa sekolah adalah alat penindasan dari establishment. Hanya pada Lartin Ekwa masih terdapat eksplikasi, bahwa pembentukan Republik Kongo merupakan kesempatan baik bagi Kongo untuk mengusir tradisi pendidikan Tropah, yang pada hakikatnya kurang mengindahkan kebutuhan bangsa Kongo untuk mendapat pendidikan praktis.

Konklusio yang terbaca setelah Konferensi tersebut sebagai berikut:

- Citaat: (Ton Elias: "ontwikkelingslanden willen minder westerseonderwijs", Amsterdam 1969, "De Tijd" hal. 9)
- Tot de sociale problematiek hoort ook het gevaar dat een snel opklimmende intelligentsia in de ontwikkelingslanden vervreemdt van het milieu waaruit zij voortkomt: vele intellektuelen trekken van dorpen weg naar de steden naar het buitenland
 - Het begint ermee dat alleen al de stichting van een school desintegrerend kan werken op het gemeenschapsleven in het dorp of streck

- Janseer Hoessein, Dirjen Dpt. Pendidikan Egypt dengan Dr. Mohamed Gafez Ghanem: menganggap perlu didokatkannya sekolah dengan kooperasi pertanian.
- Nationalistische fanatisme; afweermeechanisme t.a.v. de establishment; pedagogische simplisme en ondoordachttheid begeleiden vaak de geprojecteerde problematiek en verlangens.

kesimpulan

Indonesia menjelang abad ke XXI memerlukan pembaharuan dalam struktur serta sistim pendidikan dan pengajarannya sesuai dengan tuntutan zaman modern. Sudah disadari oleh umum bahwa struktur serta sistim yang sekarang berlaku sudah tidak cocok lagi untuk menghasilkan manusia-manusia terdidik yang harus bermental lain.

Status Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah dunia internasional sudah dapat mencerminkan adanya keinginan untuk maju ke arah masyarakat yang modern. Tetapi ternyata, bahwa faktor penghambat tidak hanya terdapat pada faktor finansial-ekonomis saja, tetapi terdapat juga pada mental masyarakatnya yang perlu dirobah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta kemauannya. Hal mana hanya dapat direalisasikan melalui pendidikan pengajaran yang integral, untuk ini diperlukan perombakan infrastruktur organisasi dan sistim pendidikan dan pengajaran, terutama yang menyangkut pendidikan dasar serta menengah, sedang bidang pengajaran universitas tidak perlu mendapat perhatian yang lebih istimewa daripada pendidikan primer (dasar) dan sekunder (menengah) tersebut, karena sebagai kelanjutan logis maka dengan sendirinya pendidikan tinggi (universiter dan yang setingkat dengan itu) akan merupakan proses kristalisasi.

Reparahan yang dihadapi oleh bidang pendidikan dan pengajaran yang sekarang masih berlaku adanya kenyataan, bahwa "irago" untuk mencapai tingkat tertentu belum banyak beroleh dari "irago" yang diciptakan oleh pendidikan di zaman kolonial feodal. Pada umumnya belum disadari, bahwa pangkat tingkat serta ijazah belum otomatis menjamin

kesanggupan serta kemampuan orang tersebut bekerja dalam lapangannya, hal mana dapat dibuktikan dalam realitas adanya ribuan tenaga-tenaga yang tidak "qualified" mulai dari lulusan sekolah dasar sampai universitas serta perguruan-perguruan tinggi, di mana terdapat kemutlakan tuntutan-tuntutan yang tidak seimbang dari si pemegang ijazah tersebut. Faktor penghambat yang terpenting ialah disebabkan karena karena sistem yang sekarang masih berlaku masih umum, yang tidak dapat menjamin tenaga-tenaga lulusan yang matang dalam bidang vaknya. Untuk ini perlu ditempuh pendidikan dasar yang sudah mengandung unsur-unsur menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara (demokrasi), pemilihan kejuruan yang tepat sesuai dengan bakatnya (seleksi), keluasaan bagi setiap individu untuk selalu mendapatkan kemungkinan memperkembang, memperkaya serta meningkatkan mutu serta tingkat pendidikannya (differensiasi), dan menjamin bagi setiap individu tanpa pandang kulit atau suku untuk secara gampang sesuai dengan aspirasi serta keinginannya pindah dari satu vak ke vak yang lain sesuai dengan proyek polajarnya yang diinginkannya (afluktuasi).

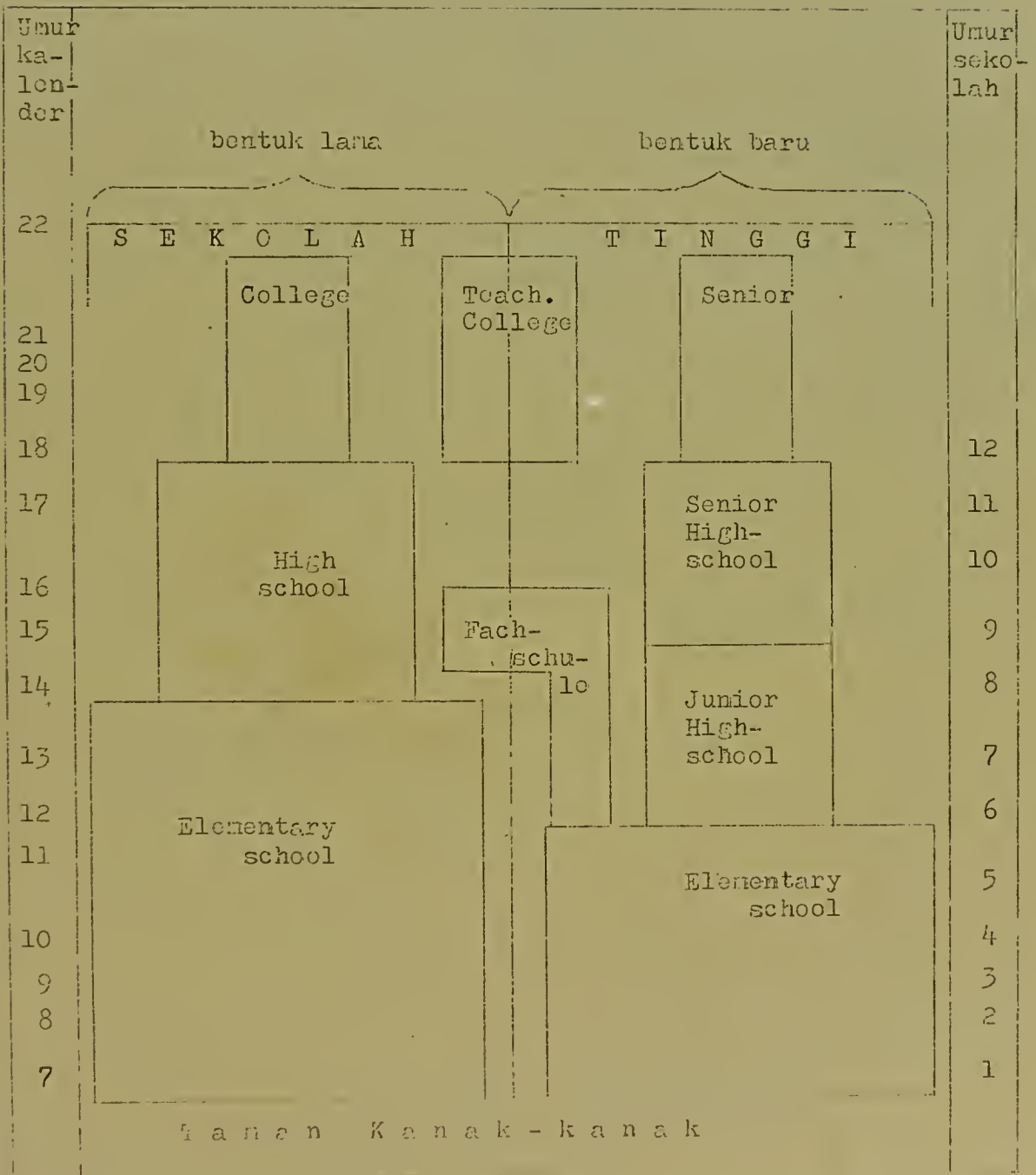
Saran kongkrit untuk perombakan infrastruktur pendidikan dasar ialah pendidikan setengah umum yang dijuruskan (diarahkan) kepada pengajaran "proyek", hal mana diperlukan untuk menimbulkan insentif serta perhatian anak didik yang perlu sebagai dasar memasuki pendidikan tingkat menengah yang bersifat 80% polyteknis. Dalam struktur baru tersebut harus dijamin unsur-unsur demokrasi, seleksi, differensiasi serta afluktuasi.

Sebagai dasar pemikiran fundamential (filosofis), pedagogis, metedis didaktis serta organisatorisnya diperlukan lembaga research yang dikerjakan oleh para ahli yang bersifat multidisipliner, agar penceropongan dapat seksama dan efektif. Faktor kontrol dan evaluasi perlu mendapat jaminan dengan baik, agar segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan. Sudah terang bahwa Universitas yang khusus ditugaskan untuk mengerjakan perisetan sirultan dengan lembaga riset extrauniversiter tersebut harus selalu dapat memberikan "voeding" ilmiah yang jitu. Fungsi kedua sentra perisetan, baik yang intra ataupun yang extra universiter, harus sinkron dan bersifat kontrol-mengontrol agar dengan demikian terdapat resultante yang positif.

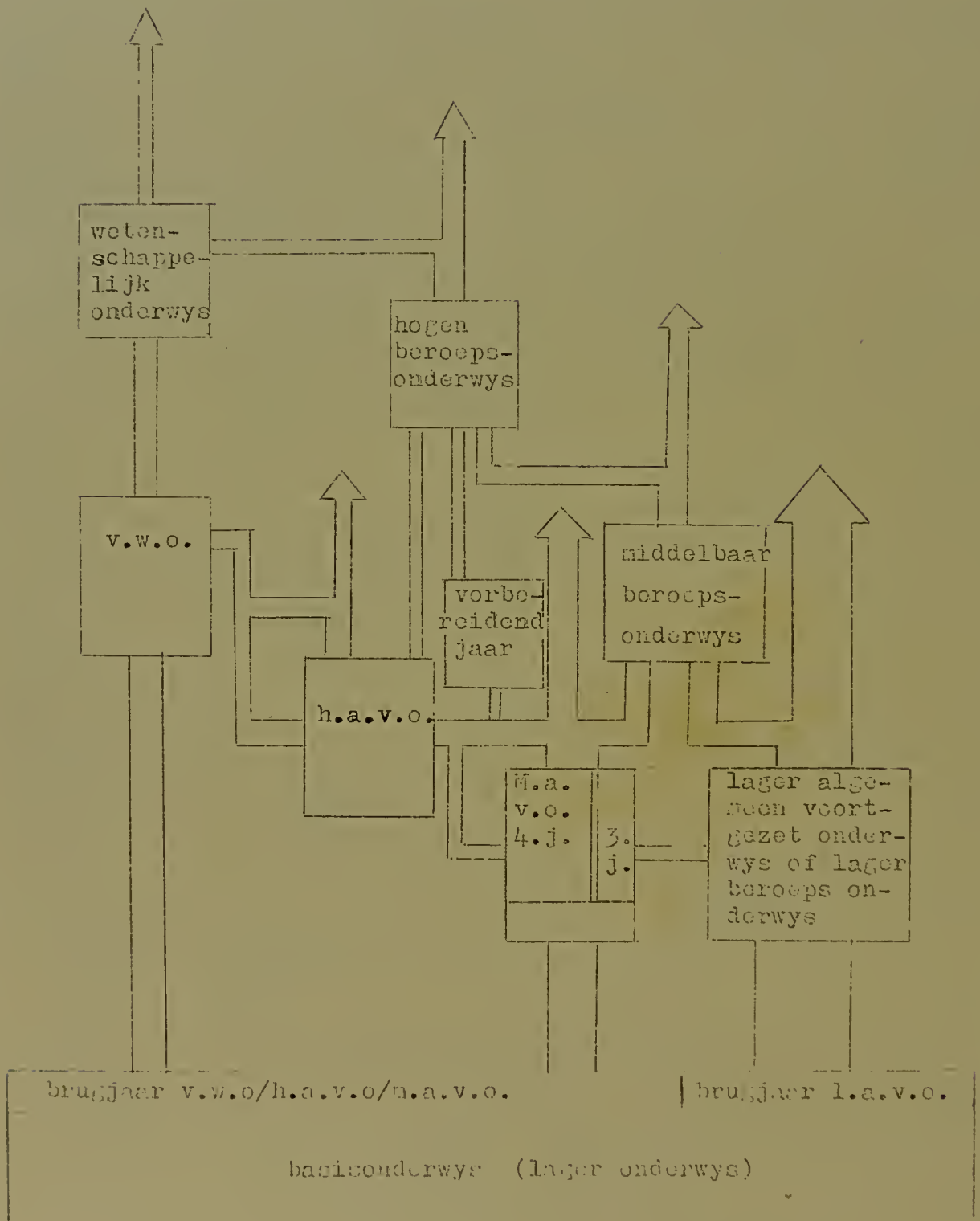
Demikian terlaksananya perbaharuan pendidikan dan pengajaran, tanpa melupakan faktor-faktor lain yang biasa menghambat rencana, maka perlu diselamatkan ide-ide serta rencana perbaharuan tersebut dari pengaruh partai politik atau siapapun saja yang ingin mempolitikannya, karena pelaksana serta perencanaannya harus terlepas dari segala pengaruh konvensionalisasi atau isme-isme lainnya yang tidak relevan. Kita perlu harus mengambil dasar pemikiran yang bersifat membandingkan dengan praktik-praktik serta seluk-beluknya yang pernah dialami oleh negara-negara yang telah mendahului mengadakan perbaharuan.

Kesimpulan secara resume ini dimaksudkan untuk menantang siapapun saja yang sependapat atau kontra berpendapat dalam persoalan pendidikan pengajaran di Indonesia. Uraian dalam kertas karya ini merupakan "jeritan" (kroten) impulsif dan rasional yang memerlukan analisa, penguraian lebih lanjut, bahkan studi yang akan memakan waktu bertahun-tahun dan akan menelan biaya yang tidak sedikit, maka diserahkan kepada tanggapan umum, khususnya tanggapan dari pihak yang berwajib di Indonesia.

Pola Persekolahan di Amerika Serikat



Pola Perskolahan di Nederland
(Perubahan "Mamootwet", 1967)



BIBLIOGRAFI:

1. De Block, A. & Volona, E. "Algemene en vergelijkende onderwijskunde", Taxonomic 1 (met cognitieve gebied), Amsterdam, Antwerpen '71.
2. Kamm-Brücher, W.: "Erziehung im technischen Zeitalter" (Aufbruch ins Jahr 2000), München-Marlaching, 1967.
3. Heinrich Besuden u.a.: "Pädagogische Pläne des 20. Jahrhunderts", Bochum 2e. Auflage.
4. Dewey, John: "Reform des Erziehungsdenken", Weinheim, 1963.
5. Wilbur Schramm: "programmierter Unterricht heute und morgen", Berlin und Bielefeld, 1963.
6. Van Heck, F.: "Het verborgen talent" (milieu, schoolkeuze en schoolgeschiktheid), Amsterdam 1968.
7. Green, P.: "Schoolkeuze en schoolsucces" (De voorspelbaarheid van schoolcarrières in het voortgezet onderwijs), Groningen 1967.
8. Idenburg, Ph.J.: "Schets van het Nederlandse schoolwezen", Groningen 1960.
9. Stellwag, H.W.F.: "Selectie en selectiemethoden: een inleidende studie in het aansluitingsvraagstuk L.C. en V.H.N.O.", Groningen, Jakarta 1955.
10. Baudet, H., Brugmans, I.J.: "Balans van Beleid" (Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indië), Assen 1961.
11. Van der Wal, S.L.: "Het Onderwijs-Beleid in Nederlands-Indië 1900-1940 (Bronnepublicatie), Groningen 1963.
12. Ki Hadjar Dewantara: "Marya Pendidikan" Bagian Pertama, Yogyakarta 1962.
13. Takdir Alisjahbana, S.: "Seal Kebudayaan Indonesia di tengah-tengah dunia", Jakarta 1958.
14. Samuel Smith dan Littlefield, A.W.: "Ikhtisar Metode Terbaik tentang belajar", Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya 1953.
15. Leonhard Froese: "Russische und Sowjetische Pädagogik" (Ideengeschichtliche Triebkräfte), Heidelberg 1963.
16. Karakenko, A.S.: "Der Weg ins Leben" (Pädagogisches Buch) hrsg. v.E.Wendt, Berlin 1949.
17. Pereday, G.Z.F.: "the changing Sovietschool" (The comparative education Society Field Study in the USSR, XVII, London 1960.
18. Torsten Husen: "Loss of Talent in Selective Schoolsystems" (the case in Sweden in comparative education review), Stockholm 1960, nr. 4.
19. Hardjesusono, B.J.S.: "Wijgerige Anthropologische Kritiek op de Theorie van John Dewey", Nijmegen 1960 (scriptie).
20. Verhaak, G.Th.L.: "Uw kind en de marktoetwet", 's Hertogenbosch 1969, 3e druk.
21. Lashuri. "Prasarana Kontenri Pendidikan dan Kebudayaan pada Musjawarah Nasional Mahasiswa, tanggal 14-21 Des. 1970 di Bogor".
22. Setijadi: "Laporan hasil Seminar Identifikasi Problema Pendidikan", (Tjipajung 23-30 April 1969), Jakarta 1969, penerbitan no. 1.

23. Petikan "RENTJANA MELANGKAPAN LIMA TAHUN" (1969-1973) sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
24. Brochure Seri Polita Pendidikan:
 1. Analisa situasi pendidikan social-ekonomi di Indonesia,
 2. Situasi dan Kesimpulan-kesimpulan,
 3. Pedoman pengintegrasian pendidikan pada sekolah dasar,
 4. Pedoman praktis pengintegrasian pendidikan pada S.L.T...
 5. idem,
 6. Saraschan,
 7. Pedoman diskusi kemasyarakatan.
25. Weekblad van het Departement van Onderwijs en Wetenschappen van 18 maart 1968, nr. 113, : "Op weg naar een nieuw onderwijs".
26. Verslag Studiedag Onderwijsresearch 's Gravenhage 17 oktober 1969: "Onderzoek en Onderwijsbeleid".
27. Verslag Unescoconferentie, Bergen 1969, : "School in dienst van de bestaande machten".
28. Hardjosusono, E.J.S.: "Analisa Problematik Pendidikan-Pengadjaran di Indonesia" (dalam Pikiran dan Gagasan), S. Ch., Aachen 1970.
29. Ton Elias: "Ontwikkelingslanden willen minder westerse school", (Onderwijsconferentie wereldraad van kerken), Nederland 1969 (Verslag).
30. Wilhelm Hehlmann: "Wörterbuch der Pädagogik", Stuttgart 1960.

PERSOALAN APPROACH DALAM MEMPOLAKAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN NASIONAL

Daed JOESOE

Pendahuluan*

"Development is the new name
for peace" (Paus Paul,
Popularum Progressio)

Setiap orang Indonesia, terutama cendekiawan, karyawan, mahasiswa dan politisi, kini sadar dan bersepakat bahwa Indonesia perlu membangun, sesedikitnya membangun perekonomiannya. Pembangunan memang perlu karena yang tidak dapat terus menerus kita pikul dan biarkan bukanlah kemiskinan dan "underdevelopment", berhubung kita telah "biasa" dengan keadaan seperti itu. Yang tidak dapat kita pikul dan biarkan berlarut-larut adalah perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin pincang di bidang pembangunan, terus menerus menjurus ke arah ketidakadilan, begitu menyolok mata dan menusuk perasaan sehingga menggugah hati nurani, tidak dapat lagi ditanggung oleh kesabaran dan bila dibiarkan dapat menghancurkan sendi-sendi negara dan masyarakat merdeka sebagaimana yang dicita-citakan di dalam tahun 1945 dan masa-masa perjuangan nasional sebelumnya. Keadilan yang diidam-idamkan tersebut bukanlah seharusnya pembagian kemiskinan yang lebih merata tetapi pembagian-pembagian yang lebih merata dari tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Maka itu disadari perlu adanya satu usaha pembangunan taraf nasional, yang dilakukan secara sadar, teratur, coherent, consistent dan kontinu; pendek kata "usaha pembangunan yang berencana dan bertahap".

* Dalam menyusun karangan ini penulis banyak diilhami oleh karya Wolfgang Armbruster dan Hans-Joachim Bodenhöfer, Research Associates dari Max-Planck-Institute for Educational Research, Berlin Barat (lihat daftar bacaan pada akhir karangan ini); tetapi pendapat diajukan oleh penulis di dalam karangan ini, termasuk kekeliruan dan kelemahan yang mungkin terdapat di dalamnya, adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penulis sendiri.

Di dalam usaha pembangunan ini peranan pendidikan cukup menentukan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan ekonomi jelas dibuktikan oleh kenyataan. Sesuatu pembangunan nasional tidak hanya tergantung pada sumber-sumber dan kekayaan alam yang dikandung oleh bumi nasional yang bersangkutan. Sebab, bila sumber-sumber alam inilah yang menentukan maka negara-negara Skandinavia ataupun Switserlan akan tergolong pada negara yang termiskin di dunia, sedangkan negara-negara Arab yang buminya banyak mengandung minyak, ataupun Congo, Brazilia dan Indonesia yang buminya banyak mengandung mineral, akan tergolong pada negara-negara terkaya. Di antara daratan serta lautan sesuatu negara dengan pendapatan per capita yang dimiliki oleh rakyatnya, kiranya terdapat satu variabel penting dan variabel yang menghubungkan kedua hal tersebut jelas bukan hanya kekayaan dan sumber-sumber alam yang dikandung oleh daratan maupun lautan tersebut. Variabel tersebut adalah "pendidikan".

Bila diakui betapa pentingnya peranan dan sumbangan pendidikan bagi usaha-usaha pembangunan, dan bila pembangunan ini hendak dilakukan secara berencana, selanjutnya lalu approach manakah yang hendak dipakai di dalam usaha mengintegrir pendidikan ke dalam usaha pembangunan tersebut. Persoalan approach inilah yang hendak dibahas oleh karangan ini dan analisisnya dibatasi pada hanya dua jenis approach pokok. Maka itu untuk keperluan pembahasan, analisa karangan akan dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama membahas "approach keperluan akan tenaga-kerja" dan yang kedua meneliti "approach kulturil dari pembentukan tenaga-kerja". Seperti lazimnya, karangan ini akan ditutup dengan satu kesimpulan.

I. Approach keperluan akan tenaga-kerja

"We are concerned with the nature and causes of the Poverty of Nations. And do not let us make a mistake in the multiplication table" (R.G. Hawtrey, Currency and Credit)

Pembangunan nasional sebagaimana yang kita cita-citakan tidak hanya merupakan pembangunan ekonomi, jelas tidak di dalam jangka panjang. Namun bila di dalam jangka pendek, "pembangunan ekonomi" yang didahulukan, demi memenuhi prasyarat

usaha pembangunan yang sehat, ada bahaya bahwa pendidikan dianggap sebagai proses transformasi yang menghasilkan (mon-supply) tenaga kerja yang disesuaikan pada perubahan-perubahan pasaran kerja, berhubung perubahan-perubahan tersebut dianggap menunjukkan kondisi-kondisi pembangunan yang secara struktural (harus) seimbang. Isu bagi ekonomi, titik tolak yang wajar di dalam mengintegrasikan pendidikan ke dalam perencanaan ekonomi adalah konfrontasi antara kebutuhan antara tenaga-kerja yang ditimbulkan oleh proses pembangunan ekonomi di satu pihak dengan arus penawaran tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan di lain pihak, satu dan lain demi pemuasan tuntutan alokasi tenaga kerja yang efisien.

Di dalam approach keperluan akan tenaga kerja (manpower-requirements approach) jumlah tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan dihitung dari jumlah pendapatan nasional yang direncanakan atau diperhitungkan akan dicapai.

Dengan perkataan lain, anak didik (educand), melalui sistem pendidikan, harus disiapkan menjadi tenaga kerja dan perencanaan mengenai keperluan akan tenaga kerja harus diintegrasikan ke dalam rangka yang menyeluruh dari perencanaan ekonomi. Jadi di dalam merencanakan keperluan akan tenaga kerja, perkembangan ekonomi di masa depan dianggap sebagai variabel yang independen, karena ia diperlakukan sebagai tujuan (target) yang ditetapkan secara tersendiri sebelumnya.

Eila pendidikan dipolakan untuk menyiapkan tenaga kerja, maka jumlah kebutuhan akan tenaga kerja tersebut dihitung berdasarkan perkembangan pendapatan nasional di masa depan. Proses perhitungan ini kiranya dapat disimpulkan melalui enam tahapan pokok:

- (1) Proyeksi produksi (output) dari sektor-sektor industri yang dihitung berdasarkan tingkat perkembangan pendapatan nasional yang ditetapkan secara independen;
- (2) taksiran mengenai perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja sektor-sektor industri;
- (3) perkembangan produksi dan perubahan-perubahan produktivitas sektor-sektor industri menentukan jumlah bahan-bahan (input) yang diperlukan;
- (4) perincian dari keseluruhan tenaga kerja (labour input) yang diperlukan ke dalam berbagai jenis (kategori) pekerjaan;
- (5) jenis-jenis pekerjaan dinyatakan ke dalam jenis-jenis dan tingkat-tingkat pendidikan yang diperlukan;

(6) kemudian dihitung jumlah tenaga kerja yang harus dihasilkan oleh sistem pendidikan di tahun-tahun yang akan datang.

Jadi menurut approach tersebut di atas perhitungan kebutuhan akan tenaga kerja dan perencanaan pendidikan yang dijuruskan ke arah pembentukan tenaga kerja dianggap sebagai satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang (secara struktural) seimbang dan bagi sistem pendidikan yang fungsional. Kebutuhan akan tenaga kerja yang disimpulkan (derived) semata-mata dari pertumbuhan ekonomi di masa depan dianggap relevan bagi alokasi yang efisien dari tenaga kerja dan bagi penggunaan yang optimal dari sumber-sumber (resources) yang tersedia pada sistem pendidikan.

Sara pendekatan persoalan pendidikan seperti ini kiranya dapat dikatakan suatu approach "ekonomi uni-dimensional" atau approach "pendidikan yang dijuruskan pada pasaran kerja", di mana pembiayaan-pembiayaan pendidikan pada azasnya diperlakukan sebagai "pengeluaran konsumsi" dan bukan sebagai "pengeluaran-pengeluaran investasi" dan di mana kapasitas absorpsi masyarakat terhadap benda konsumsi yang bernama "pendidikan" tersebut semata-mata ditentukan oleh struktur dan trend pertumbuhan modal nyata (tangible capital) yang dipekerjakan di dalam ekonomi masyarakat.

Bila demikian, di dalam mempolakan perkembangan pendidikan, approach keperluan akan tenaga kerja tersebut, menurut hemat kami, mengabaikan faktor-faktor dan kepentingan-kepentingan yang lain dari faktor-faktor dan kepentingan-kepentingan ekonomi dan secara implisit menetapkan pula suatu order hierarkis terhadap permintaan-permintaan yang saling bersaing terhadap sistem pendidikan.

Di pihak lain, walaupun kita tetap membatasi diri pada pemikiran ekonomi semata-mata, hipotese yang menjadi dasar approach tersebut, yaitu tingkat kemajuan teknik yang otonom, kami anggap tidak sesuai dengan kenyataan. Bukankah konsep tingkat kemajuan teknik yang otonom, menganggap bahwa penggunaan tenaga kerja (labour input) hanya merupakan dependent variable dari perubahan teknis ekonomis. Padahal terbukti bahwa penemuan-penemuan (innovations) dan pemikiran baru yang menimbulkan perubahan-perubahan teknis itu tidak hanya hasil dari aktivitas-aktivitas yang memang dijuruskan secara sadar ke arah penemuan baru tersebut pada masa-masa sebelumnya, tetapi telah timbul secara spontan di dalam proses :

produksi, sebagian sebagai akibat perlipat-gandaan tenaga-tenaga ahli yang telah dipkerjakan sebelumnya, sebagian lagi karena perubahan-perubahan nilai serta pandangan hidup, motif kerja, hubungan dan pandangan tradisional masyarakat yang secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi sikap dan perbuatan para tenaga kerja. Jadi variabel independent dari approach keperluan akan tenaga kerja, yaitu pertumbuhan pendapatan nasional dan perkembangan teknik yang otonom, mewakili hanya sebagian dari variabel-variabel yang sebenarnya menentukan keperluan, kebutuhan dan penggunaan tenaga kerja.

II. Approach kultural pembentukan tenaga kerja

"Bann Economics! Let us build a decent world". (F.V. Hayek, Road to serfdom)

Permintaan masyarakat akan "pendidikan" adalah fungsi dari satu kompleks set dari pertimbangan-pertimbangan dan determinan-determinan. Permintaan yang diajukan oleh para orang tua murid dan para mahasiswa akan pendidikan yang kontinu hanya sebagian saja, dan secara samar-samar, berhubungan dengan keperluan-keperluan akan tenaga kerja dan kesempatan kerja di masa depan. Hal ini jelas terlihat pada perbedaan-perbedaan di dalam pendaftaran pada perguruan-perguruan menengah dan tinggi di kalangan kelompok-kelompok sosio-ekonomis masyarakat; perbedaan-perbedaan tersebut dalam dirinya mencerminkan adanya pengaruh status ekonomi serta variabel-variabel sosio-logis dan psikologis atas permintaan pendidikan.

Demang tidak dapat dimungkiri kenyataan bahwa sebagian permintaan akan kategori pendidikan-pendidikan tertentu semata-mata karena kekurangan pengetahuan ataupun pengetahuan mengenai perkembangan pasaran kerja dan kesempatan kerja di masa depan, karena ketidak-pastian mengenai pilihan atas jabatan-jabatan, sebagai akibat kurangnya pencerahan resmi dan akibat tidak adanya rencana pendidikan yang integral dengan rencana pembangunan. Hal-hal yang disebut terakhir ini pada gilirannya menimbulkan pengangguran-pengangguran di kalangan lulusan-lulusan pendidikan tertentu. Namun begitu pendidikan per se kiranya harus dilihat sebagai satu hak asasi manusia yang pokok di dalam setiap masyarakat dan sebagai satu nilai di dalam dirinya sendiri yang, bila dipandang dari sudut

culturo-politik -- demi penyempurnaan jalannya demokrasi dan pertumbuhan kebebasan pribadi¹ anggota-anggota masyarakat -- tidak akan sia-sia dan karenanya tidak akan pernah merupakan hal yang berlebih-lebihan. Kesanggupan membaca dan menulis yang merata dan keharusan belajar itu sendiri pada umumnya sudah dianggap sebagai tujuan politik yang penting terlepas dari perscalan strategi pendidikan yang dijuruskan ke arah meningkatkan pembangunan nasional secara maksimum.

Malaupun di dalam membahas persoalan pelajaran dan perencanaan pendidikan kita hendak membatasi diri pada rangka pembangunan ekonomi, menurut hemat kami, pembangunan ekonomi tidak boleh semata-mata sebagai "pertumbuhan pendapatan nasional per capita". Pembangunan ekonomi secara essensial adalah "pertumbuhan" dan "perubahan". Bukanlah pertumbuhan lebih dahulu dan kemudian baru menyusul perubahan, menurut satu order kronologis di dalam dimensi waktu. Sebab, pertumbuhan dapat juga terjadi melalui mutasi dan perubahan, sama halnya dengan timbulnya perubahan sebagai akibat adanya pertumbuhan.

Perubahan, yaitu keseluruhan dari proses transisi dari struktur masyarakat yang statis² ke arah sistem sosial yang dinamis³ serta modernisasi masyarakat, harus dianggap sebagai bagian dari pembangunan. Bahkan dapat dikatakan bahwa bagi negara-negara muda yang sedang membangun, inovasi (pendapatan dan pemikiran baru) mengenai rangka sosio-kultural dari produksi adalah jauh lebih penting sebagai prasyarat dan penggerak pertumbuhan ekonomi.

¹Kebebasan di sini kami artikan sebagaimana yang kami ajukan di dalam tulisan kami sebelum ini; Daed Joesoef, Biantoro Wanandi, P. Simandjuntak dan M. H. Soesastro, "Pendidikan, Kebebasan dan Pembangunan Masyarakat", Pikiran dan Gagasan, No. 5 (S.Ch.), 1970

²Struktur masyarakat yang statis ditandai antara lain oleh stratifikasi masyarakat yang didasarkan pada norma-norma tradisional dan religius, cara-cara produksi dan administrasi tradisional, kehidupan politik yang otoriter, pembagian pendapatan yang pincang.

³Berdasarkan pada persamaan dalam kesempatan, mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal dan struktur sosial yang bersifat "meritocratic".

Jika sumbangan positif yang dapat diberikan oleh pendidikan adalah, sebagaimana pula telah terbukti dalam banyak negara yang perekonomiannya masih terbelakang, bahwa ia menggerakkan pembangunan ekonomi pertama-tama dan terutama melalui aksinya terhadap prasarana sosio-kultural. Ia mempengaruhi, merombak, merubah¹ dan membentuk lembaga-lembaga sosial dan kultural. Ia mendorong sikap individuil ke arah efektifitas dan integritas dan sikap komunal ke arah rasionalitas dan fungsional. Ia membentuk anggota-anggota masyarakat menjadi tidak hanya pendukung-pendukung budaya tetapi lebih-lebih menjadi pengolah-pengolah budaya². Jadi, berhadapan dengan kondisi-kondisi kemasyarakatan sebagaimana yang dihadapi oleh negara-negara muda seperti Indonesia, sumbangan pendidikan pada pembangunan ekonomi, menurut kami (approach kultural) seharusnya untuk sebagian terbesar terdiri dari "pengaruh inovatif" (innovative effects) terhadap kondisi-kondisi kemasyarakatan yang menghambat perkembangan pembangunan. Supaya pendidikan dapat memenuhi harapan-harapan tersebut, cara dan isi pendidikan harus dipolakan demikian rupa sehingga ia dapat menimbulkan dan mendorong hasrat (motivasi) untuk kemajuan, hasrat untuk pembaharuan, perubahan, inisiatif, adaptasi serta kapasitas dan hasrat untuk belajar terus menerus, di samping membangun kecakapan teknis-instrumental sebagaimana yang menjadi target approach keperluan akan tenaga kerja; sebab kecakapan teknis-instrumental tersebut, betapapun penting efeknya, ternyata kurang efektif dalam menggerakkan roda pembangunan.

¹Yaitu perubahan-perubahan mengenai: lembaga kehidupan, struktur dan cara organisasi tradisional dan motivasi serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh anggota-anggota masyarakat.

²Pendukung budaya adalah orang yang dengan setia meneruskan nilai-nilai hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tetapi nilai-nilai yang membuat sesuatu masyarakat hidup dari masa ke masa tidak dengan sendirinya merupakan nilai-nilai yang membuat masyarakat yang bersangkutan maju dan berkembang. Untuk kemajuan ini diperlukan adanya pengolah-pengolah budaya, yaitu orang yang sanggup merubah dan membentuk kembali nilai-nilai usang, guna lebih fungsional dan sesuai dengan syarat-syarat baru yang menuntut oleh masa baru. Hal ini menjadi lebih jelas bila diingat bahwa perkembangan teknologi tidak hanya begitu saja dapat dipindahkan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, karena teknologi itu juga merupakan bagian dari nilai kehidupan ataupun kebudayaan masyarakat yang menciptakannya; ia tumbuh dari kebudayaan yang dibayati oleh masyarakat yang bersangkutan. Teknologi adalah (bagian dari) kebudayaan.

Berhadapan dengan konsep "effisiensi alokatif tenaga kerja tenaga kerja, yaitu konsep teoritis yang merupakan latar belakang kalkulasi approach keperluan akan tenaga kerja, approach kulturil pembentukan tenaga kerja mengajukan konsep "effisiensi inovatif tenaga kerja", karena approach yang terakhir ini sadar bahwa persoalan alokasi tenaga kerja yang efisien, yang pada gilirannya diilhami oleh "teori produktivitas marginal"¹, mengabaikan kondisi dan implikasi perubahan-perubahan inovatif di dalam sistim produksi dan proses bekerja yang sangat menentukan perkembangan ekonomi. Tetapi konsep effisiensi inovatif tenaga kerja ini tidak terbatas pada sfeer teknis dan ekonomis dari perubahan-perubahan teknologi produksi. Konsep ini meliputi pula, bahkan pertama-tama, proses transisi struktur sosial yang, sebagaimana telah disebut di atas, merupakan elemen primordial bagi perkembangan ekonomi.

Demi pengolahan lebih lanjut dari konsep effisiensi inovatif melalui pengamatan-pengamatan empiris kiranya dapat disusun elemen-elemen dari satu repertoire tugas atau peranan yang diperlukan di dalam pelaksanaan sesuatu pekerjaan atau jabatan di satu pihak dan elemen-elemen dari kwalifikasi khusus sebagai akibat langsung atau tak langsung dari pendidikan di lain pihak. Kedua hal tersebut, yang dalam dirinya dapat pula dinyatakan sebagai permintaan dan penawaran akan tenaga kerja, dinyatakan secara skematis dalam diagram di halaman 37. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa pekerjaan atau jabatan teknikal-instrumental di satu pihak dan kompetensi professionil di lain pihak, masing-masing dalam dirinya merupakan "inti" dari pekerjaan atau jabatan dan kwalifikasi yang spesifik, yang masing-masing kemudian diliputi oleh elemen-elemen tambahan berupa berbagai syarat pekerjaan (di pihak permintaan akan tenaga kerja) dan bermacam elemen kwalifikasi (di pihak penawaran akan tenaga kerja), yang secara normal tidak disebut-sebut baik di dalam definisi sesuatu pekerjaan ataupun jabatan maupun di dalam sesuatu ijazah formal. Walaupun bukan "inti", melainkan merupakan "tambahan", syarat-syarat kerja dan elemen-elemen kwalifikasi tersebut bukan tidak mempunyai arti di dalam merekrut tenaga kerja dan bagi usaha membentuk tenaga

¹Yang secara tradisional dipakai untuk menentukan keseimbangan perkembangan ekonomi dalam suasana perubahan teknik yang dianggap eksogin.

kerja. Ada baiknya ditegaskan bahwa arti (weight) relatif dari tambahan syarat-syarat pekerjaan dan tambahan elemen-elemen kualifikasi tersebut adalah berbeda-beda menurut jenis dan tingkat pekerjaan atau jabatan dan bahwa konsep efisiensi inovatif tenaga kerja terutama mengenai syarat-syarat dan elemen-elemen tambahan tersebut.

Cara pendekatan persolan pendidikan dalam rangka pembangunan ekonomi yang lebih luas ini pada azasnya menganggap pembiayaan pendidikan yang telah dikeluarkan oleh masyarakat sebagai satu "pengeluaran investasi", yaitu satu "human investment". Pendidikan di sini bukan saja diakui dapat mendorong pembangunan tetapi pendidikan itu sendiri diperlukan sebagai tujuan suci pembangunan. Sebab bila pembangunan dapat dianggap sebagai kebangkitan sesuatu bangsa, pendidikan seharusnya dianggap sebagai kebangkitan pikiran, intelek dan rohani manusia individu.

Bila di dalam approach tenaga kerja kapasitas absorpsi masyarakat terhadap "hasil-hasil" pendidikan ditentukan oleh struktur dan trend pertumbuhan modal nyata yang dipkerjakan di dalam ekonomi masyarakat, di dalam approach kulturil kapasitas absorpsi adalah fungsi dari efisiensi inovatif dari tenaga-tenaga kerja yang dipkerjakan.

Penutup

"Manusia adalah finalitas dari pendidikan"

Pendidikan adalah faktor pendorong bagi produksi. Ia mengembangkan produktivitas faktor-faktor produksi lainnya. Ia membangun, menyebar-luaskan dan mempertinggi mutu kecakapan manusia. Ia mendorong penemuan-penemuan (innovations) dan karenanya mendorong dan memperlancar perubahan-perubahan di bidang kehidupan yang dituntut oleh jamannya.

Ada permintaan akan "pendidikan" karena orang membutuhkan pendidikan itu sendiri dan bukan hanya karena orang membutuhkan apa-apa yang dihasilkan oleh pendidikan itu, walaupun hasil itu bernama "tenaga kerja". Pendidikan mempunyai "tujuan" (vocation) dan "panggilannya" sendiri. Tujuannya adalah manusia, sebagai keseluruhan, yang tidak mungkin dicapai oleh "pembangunan", karena manusia bukanlah satu konsep yang tetap (fixed) tetapi konsep yang terus berubah dan berkembang.

Langgилannya adalah kebenaran, yang harus terus menerus dicari walaupun banyak halangan dan rintangan, melampaui semua batas, termasuk batas yang berupa kapasitas modal nyata yang digaris-kan oleh rencana pembangunan ekonomi.

Hal ini bukanlah berarti bahwa di dalam pemolakan dan merencanakan perkembangan pendidikan di masa depan, kita harus atau dapat mengabaikan sama sekali prospek pembangunan ekonomi di masa depan. Hal ini hanya ingin mengingatkan bahwa sumbangan pendidikan pada pembangunan sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk mengkebiri dimensi pendidikan itu sendiri, apalagi meredusir manusia menjadi hanya pelengkap modal nyata.

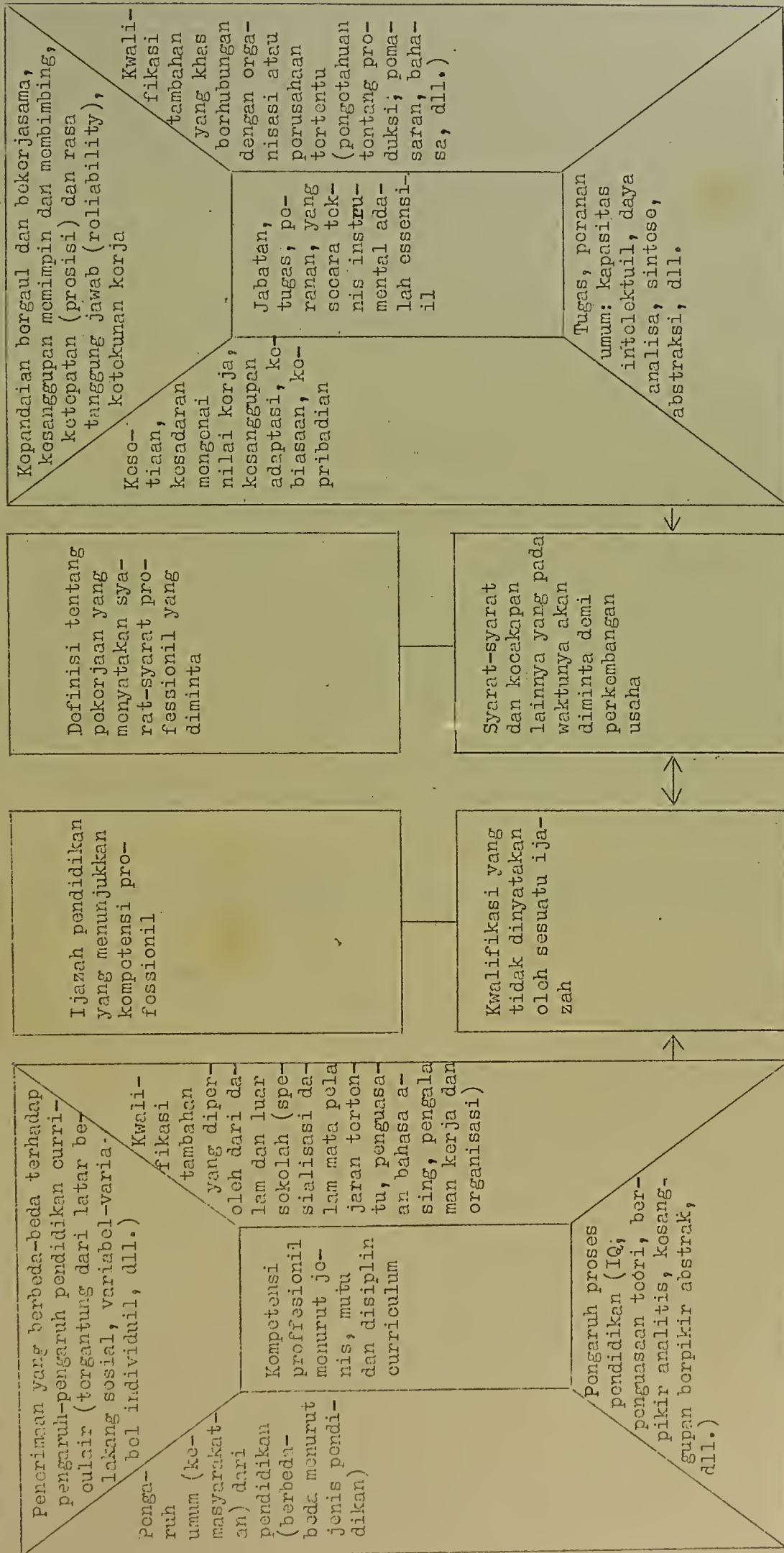
Pembangunan adalah sekaligus pertumbuhan dan perubahan. Perencanaan tenaga kerja, sebagaimana yang didasarkan pada approach tenaga kerja, mengabaikan elemen-elemen penting, bahkan elemen-elemen yang menentukan sekali, bagi sesuatu kebijaksanaan pendidikan yang ditujukan guna mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Kualifikasi yang diperlukan oleh efisiensi inovatif dari tenaga kerja tidak dapat disimpulkan (derived) dari perkembangan ekonomi di masa depan sebagaimana yang dilakukan oleh approach keperluan akan tenaga kerja. Karenanya pemolaan dan perencanaan pendidikan perlu didasarkan pada analisa mengenai isi proses pendidikan dan implikasinya atas orientasi, kompetensi dan sikap anak didik di satu pihak dan pengamatan (investigation) mengenai sumbangan-sumbangan potensiil sistim pendidikan pada perubahan-perubahan ekonomi dan sosial di pihak lain. Di samping ini, sebagai pelengkap, diperlukan pula analisa mengenai kapasitas absorpsi ekonomi masyarakat terhadap tenaga kerja terdidik dan terlatih dan determinan-determinannya, terutama sejauh yang mengenai kualifikasi dan sikap tenaga kerja yang dipekerjakan.

Permintaan akan tenaga kerja

Penawaran akan tenaga kerja

Syarat-syarat pelaksanaan tugas

Elemen-elemen kualifikasi



Elemen-elemen kualifikasi penawaran tonga kerja dan olomon-olomen tuntutan polaksanaan pekerjaan

BAHAN BACAAN:

- Daoud Joescof, "Kota, Universitas dan pembentukan manusia", Pikiran dan Gagasan, no. 4, (3. Nas.), 1970.
- Daoud Joescof, Biantoro Manandi, Pinter Simandjuntak dan H. Hadi Soesastro, "Pendidikan, kebebasan dan pembangunan masyarakat", Pikiran dan Gagasan, no. 5 (s. 3h.) 1970.
- E.J.S. Harjosuseno, "Analisa problematik pendidikan-pengajaran di Indonesia", loc.cit.
- Henri Dieuzeide, "Educational Technology and Development of Education", International Education Year 1970 (Paris: UNESCO, 1970).
- Liong Tiong Tiat, "An Existentialist Approach to Education", Pedagogia dan Pengajaran, no. 3, Djuli 1961.
- Malcolm S. Adiseshiah, Let My Country Awake (Paris: UNESCO, 1970).
- Mashuri, Menteri P dan K, "Trasaran mengenai persoalan pendidikan", diutjapkan dimuka Musyawarah Nasional Mahasiswa, di Bogor, 14-21 Des. 1970.
- idem, "Basic Memorandum Tentang Pendidikan", kertas-kerdja, 25 Nov. 1970.
- H. Hadi Soesastro, "Desa dan kepentingan Nasional", Pikiran dan Gagasan, no. 4, (3. Nas.), 1970.
- "Programme of Educational Assistance to the Five-Year Plan", Draft for a Report by the Minister of Education, Instalment I dan II, Djuli 1968.
- H. Harjoseputro, "Membentuk manusia Indonesia Baru", Kumpulan Kertas-Karya Konferensi Ilmiah ke-3, Pikiran dan Gagasan, 1970.
- Wolfgang Armbruster and Hans-Joachim Bodenhöfer, "Manpower Approach versus Cultural Approach to Educational Planning", International Industrial Relations Association, 1970.

BEBERAPA ASPEK EKONOMI DALAM PENYUSUNAN PLANNING PENDIDIKAN

F. Hendrarto POESPCSOETJITO

Pendahuluan

Dalam prasaran ini ingin diajukan beberapa pokok persoalan dalam bidang ekonomi pendidikan. Tidak dimaksudkan di sini untuk secara mendalam mengupas persoalan tersebut, melainkan sekedar memberikan bahan tambahan untuk diskusi.

Maksud untuk menyedorkan tema ini adalah tidak lain untuk memberikan bantuan pemikiran dalam penyusunan suatu planning pendidikan dalam rangka pembangunan nasional. Sebagai pedoman planning tersebut diambil pengalaman-pengalaman yang terdapat di negara-negara maju. Hal ini perlu diperhatikan agar kita dapat menghindari kekeliruan-kekeliruan yang pernah dialami oleh negara-negara maju.

Pengertian dan Interesse atas ekonomi pendidikan

Pengertian ekonomi pendidikan barulah muncul pada permulaan tahun limapuluhan. Dasar pemikiran adalah pendidikan dan penyelidikan (riset) merupakan salah satu unsur ekonomi secara keseluruhan, mengingat pendidikan dan penyelidikan dapat dipandang sebagai alat produksi dengan tujuan untuk meningkatkan taraf penghidupan. (Hal ini hanyalah merupakan salah satu aspek pendidikan. Karena lepas dari tujuan ekonomi, terdapat juga unsur 'manusia' itu sendiri. Hal ini di sini tidak disinggung). Sampai saat ini pengertian bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur ekonomi secara menyeluruh, belumah diterima secara umum. Eombach pernah menulis bahwa ekonomi pendidikan mengalami perkembangan dan nasib sejajar dengan ilmu keuangan.

Usaha pertama untuk menganalisa aspek ekonomi pendidikan secara sistematis dilakukan di Amerika Serikat¹. Hanya baru-baru ini baik oleh institusi-institusi internasional, seperti UNESCO dan OECD, maupun oleh negara-negara maju, persoalan ekonomi pendidikan mendapatkan perhatian besar. Hal ini disebabkan oleh:

1. Besarnya pembiayaan pendidikan (di Jerman Barat pembiayaan pendidikan mencapai $\pm 3,4\%$ atau lebih daripada produksi sosialnya). Dari penyelidikan-penyelidikan atas pendidikan ternyata bahwa pengeluaran/pembiayaan pendidikan bertumbuh besar lebih daripada pertumbuhan/perkembangan baik penduduk maupun produksi sosial².

Laka dirasa perlu adanya penyelidikan 'ekonomi pendidikan' secara sistematis untuk menentukan kriteria-kriteria yang rasional mengenai besar serta struktur pengeluarannya/pembiayaannya demi penentuan alokasi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Perkembangan ini menyebabkan di satu pihak adanya pergeseran titik-berat dari kuantitas ke kualitas mutu pendidikan dan di lain pihak bahwa pendidikan merupakan salah satu pengeluaran di mana penentuan pembiayaannya tidak terlepas dari pembiayaan kebutuhan-kebutuhan sektor ekonomi lainnya³. Laka perlu dicari jalan untuk menentukan alokasi secara optimal untuk pendidikan.

2. Mengingat kekuatan-kekuatan pasaran (market forces) dalam sektor pendidikan tidak secara langsung dapat mempengaruhi, maka dengan sistim alokasi, sektor pendidikan dapat dipengaruhi. Untuk menentukan alokasi tersolut dibutuhkan adanya suatu planning dari pihak pemerintah. Planning yang dibuat oleh pemerintah mempunyai tujuan untuk menentukan politik pendidikan dan memilih/menentukan prioritas dalam strategi pendidikannya. Di sini perlu diperhatikan perubahan-perubahan struktural yang akan datang baik dari sudut permintaan (demand) di sektor ekonomi nasional,

¹T.W. Schultz, Investment in Man, An Economic View, Social Science Review, 23 (1959), 109.

T.W. Schultz, Capital Formation by Education, Journal of Political Economy LXVIII (1960), hal. 571.

²F. Eddin, Internationale Tendenzen in der Entwicklung der Ausgaben für Schulen und Hochschulen, Kieler Studien, Bd. 47, (Kiel: 1958)

J. Vaizay, The costs of education. (London: 1960)

³F. Harbison dan Ch. A. Myers, Education, Manpower and Economic growth, Strategies of Human Resource Development, (New York).

industriil dan di sektor pemerintahan maupun dari sudut penawaran (supply) dari sistim pendidikan atas tenaga ahli (qualified and high qualified workers), supaya secara sistematis diperhitungkan. Perlu diingat bahwa proses pendidikan memakan waktu yang lama (long operation period).

3. Tuntutan bahwa pertumbuhan/perkembangan ekonomi (economic growth) tidak boleh terganggu dan harus berjalan lancar mendorong untuk mempelajari persoalan-persoalan ekonomi pendidikan. Pengalaman yang dialami oleh negara-negara maju pada tahun limapuluhan adalah bahwasanya sebelumnya terdapat kelebihan penawaran tenaga ahli dan seterusnya (dari tahun limapuluhan sampai sekarang) permintaan atas tenaga ahli melebihi penawarannya. (Di Indonesia, seperti di negara-negara yang sedang berkembang, secara latent terdapat kelebihan penawaran tenaga ahli). Di lain pihak karena inelastisitas penawaran sektor pendidikan, maka perhatian bertambah besar untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan penduduk-pekerja dan tingkat pertumbuhan/perkembangan ekonomi. Kenaikan produksi faktor-faktor produktif yang tersedia hanyalah tercapai dengan kenaikan tingkat serta mutu pendidikan. Maka pemerintah harus mengadakan perluasan dalam bidang pendidikan secara menyeluruh dan teratur, karena sistim pendidikan menentukan pentrapan faktor 'kemajuan teknik' (technische Fortschritt) melalui perluasan/pengintensipan penyelidikan dan melalui pemberian pengetahuan serta kecakapan/ketrampilan pada penduduk-pekerjanya.

Terlihat di atas bahwa interest untuk menyelidiki relevans ekonomis pendidikan didasarkan atas tuntutan praktis-politis. Sebagai dasar analisa adalah penerusan dari teori neo-klassik pertumbuhan/perkembangan ekonomi (economic growth)¹.

Dalam penyelidikan-penyelidikan 'ekonomi pendidikan' dipergunakan beberapa model/metode analisa, yaitu model penawaran (individual demand approach), model permintaan (manpower approach), kombinasi kedua model tersebut dan model 'cost benefit'. Model-model tersebut mempunyai persamaan, yaitu kesempatnya mereka menentukan hubungan antara pendidikan dan pendapatan.

¹Heinz König, Wachstum und Entwicklung der Wirtschaft, (Köln: Kiepenhauer & Witsch, 1968)

Di bawah ini ingin diuraikan secara singkat metode-metode tersebut. Metode 'cost benefit' tidak akan disinggung mengingat metode tersebut mempunyai kelemahan yang inheren, yaitu:

1. dasar mikro-ekonomis dan
2. adanya konkurensi yang sempurna

Ini tidak berarti bahwa metode ini salah, melainkan pada saat ini kurang relevant untuk pembangunan di Indonesia.

Model Penawaran (individual approach)

Tujuan model penawaran adalah memberikan secara cukup atas kemungkinan-kemungkinan/kesempatan-kesempatan pendidikan pada mereka yang memintanya. Dasar dari model tersebut adalah pandangan yang liberal, yaitu pemerintah harus memenuhi keinginan yang layak dari tiap warga negaranya. Seperti Dahrendorf mendasarkan tesisnya pada ide: 'Bildung ist Bürgerrecht'¹. Didorong oleh keinginan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk belajar serta memilih jenis pekerjaan mengharuskan pihak pemerintah untuk mengadakan alokasi yang optimal, baik manusia maupun alat. Ini hanya dapat dilaksanakan jika ada keseimbangan dalam besar serta struktur dari penawaran dan permintaan.

H.P. Widmaier mengajukan model penawaran dalam penelitiannya untuk negara bagian Baden-Württemberg². Dasar dari model ini adalah mengadakan suatu prognose penduduk, tidak hanya dilihat dari sudut perkembangannya, akan tetapi juga mobilitas yang horizontal.

Kelemahan model penawaran adalah penaknaan koefisien-koefisien yang fix, di mana penganggapan bahwa keadaan yang lampau akan berjalan terus. Model ini mengambill sistim yang ada sebagai ukuran untuk waktu yang akan datang. Ini dapat diterima, jika sistim yang ada memuaskan. Kelemahan lain dari model penawaran adalah permintaan akan tenaga ahli sama sekali tidak diperhatikan, yang memberikan pengaruh selanjutnya pada taraf harga.

¹K. Dahrendorf, Bildung ist Bürgerrecht (Osnabrück: 1963)

²H.P. Widmaier, Bildung und Wirtschaftswachstum, Schriftenreihe des Kultusministerium Baden-Württemberg; (1968).

Model Permintaan (manpower approach)

Model penawaran memperlihatkan adanya bahaya akan kelebihan atau kekurangan produksi tenaga ahli. Individualisme terbentur pada batas-batas ekonomi. Model permintaan bertitik-tolak dari kebutuhan akan tenaga ahli. Dasar pemikiran model permintaan adalah bahwasanya tujuan pendidikan dapat disimpulkan dari perkembangan ekonomi.

Jadi pendidikan adalah tergantung atas perkembangan/pertumbuhan pendapatan nasional. Model ini ingin menentukan suatu sistem pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan demi alokasi optimal yang efisien dan ekonomis. Kelemahan model permintaan adalah apakah dapat dijamin bahwasanya permintaan akan terpat pendidikan tidak akan melampaui batas kemampuan.

Kombinasi Model Penawaran dan Permintaan

Mengingat adanya hubungan timbal-balik dari kedua model tersebut di atas, maka dirasa perlu adanya suatu model kombinasi, yang mengambil faktor-faktor dari kedua model di atas. Dalam model Widmaier¹ dan Bahr² telah dicoba untuk mengupas persoalan ini. V. Weizsäcker menganalisa faktor-faktor kausal untuk sukses dari sudut psikologis dan sosiologis dengan pemakaian computer untuk mencakup perubahan-perubahan dan menentukan 'apa' dan 'apa yang mungkin'³. A. Hegelheimer memberikan suatu skema model kombinasi antara penawaran dan permintaan yang kami lampirkan di bawah⁴.

Kesimpulan

Mengingat pentingnya pendidikan untuk perkembangan/pertumbuhan ekonomi, perlu kiranya diperhatikan faktor-faktor ekonomi. Mengingat perkembangan pengetahuan 'ekonomi pendidikan' masih berjalan dan dengan belum adanya model

¹ ibid.

² K. Bahr dan H.P. Widmaier, Bildungsplanung, Ansätze einer rationalen Bildungspolitik (Stuttgart: 1966)

³ C.C.V. Weizsäcker, Ein quantitatives Modell des Bildungswesen, Institut für Bildungsforschung (Berlin: 1967)

⁴ A. Hegelheimer, Bildungsökonomie und Bildungsplanung, Konjunkturpolitik 7 (1968), hal. 93.

yang memuaskan untuk menentukan planning pendidikan, salah satu model yang kiranya dapat diambil adalah model kombinasi penawaran/pemintaan. Model tersebut berdasarkan atas "balance of education" yang sempurna, yang merupakan kelemahan model tersebut.

Untuk merealisasikan penyusunan planning pendidikan perlu kiranya diadakan suatu institusi untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan persoalan pendidikan secara sistematis dan menyeluruh.



